



**PERUBAHAN RENSTRA**  
**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**  
**KOTA MOJOKERTO**  
**TAHUN 2018- 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA MOJOKERTO**  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunianya, perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 dapat tersusun.

Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan Renstra Bakesbangpol Tahun 2018 – 2023 juga berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023.

Perubahan Renstra Bakesbangpol Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Perubahan Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kota Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Mojokerto, November 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MOJOKERTO

  
MOCH. IMRON, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720828 199201 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	9
2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5. Penentu Isu-Isu Strategi.....	37
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
6.1. Program dan Kegiatan.....	44
6.2. Kelompok Sasaran.....	45
6.3. Pendanaan Indikatif.....	46

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	90
BAB VIII. PENUTUP.....	92
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai / Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan Bakesbangpol Kota Mojokerto.....	11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Golongan/ Ruang Bakesbangpol Kota Mojokerto.....	11
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai/ Personil Yang Telah Mengikuti Diklatpim Bakesbangpol Kota Mojokerto.....	12
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai/ Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Bakesbangpol Kota Mojokerto.....	12
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor BakesbangpolKota Mojokerto.....	13
Tabel 2.6	Frekuensi Unjuk Rasa di Kota Mojokerto Menurut Kelompok Pelaku.....	18
Tabel 2.7	Frekuensi Unjuk Rasa di Kota Mojokerto Menurut Tuntutan.	18
Tabel 2.8	Jumlah Orang Asing Pendetang di Kota Mojokerto.....	
Tabel 2.9	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Mojokerto Dalam Pemilihan Umum tahun 2014 – 2019.....	19
Tabel 2.10	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Mojokerto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 – 2018.....	20
Tabel 2.11	Pendidikan Politik Tahun 2015 – 2019.....	20
Tabel 2.12	Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Kota Mojokerto Tahun 2015 – 2019.....	21
Tabel T-C.23 (Tabel 2.13)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.....	22
Tabel T-C.24 (Tabel 2.14)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.....	23

Tabel T-B.35 (Tabel 3.1)	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	31
Tabel T-C.25 (Tabel 4.1)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
Tabel T-C.26 (Tabel 5.1)	Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	41
Tabel T-C.27 (Tabel 6.1)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2019.....	47
Tabel T-C.27 (Tabel 6.2)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kota Mojokerto ,Tahun 2020.....	54
Tabel T-C.27 (Tabel 6.3)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2012-2023.....	57
Tabel T-C.27 (Tabel 6.4)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2023.....	75
Tabel T-C.28 (Tabel 7.1)	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM.....	91



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.....	11
------------	---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2019 Kota Mojokerto telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Pasal 342, disebutkan bahwa perubahan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 342 Ayat 1, efektivitas waktu perubahan pada Pasal 342 Ayat 2, serta kategorisasi dari perubahan yang mendasar dalam rangka perubahan RPJMD pada Pasal 342 Ayat 3. Kota Mojokerto dalam melakukan perubahan RPJMD telah memenuhi ketentuan yang dimaksud, yaitu masa berlaku RPJMD Kota Mojokerto masih lebih dari 3 (tiga) tahun, serta berbagai alasan yang mendasar, diantaranya :

1. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, serta perencanaan pembangunan nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.



2. Penyesuaian perencanaan daerah akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang untuk melakukan *realocation* dan *refocusing* penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tentunya berimbang pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
3. Penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah.
4. Penyelarasan tata cara penyusunan dan substansi rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan mempertimbangkan isu-isu pembangunan yang aktual.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, perubahan Renstra Bakesbangpol juga menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Yang mana kebijakan tersebut membawa dampak adanya penggabungan beberapa Perangkat Daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Bakesbangpol dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bakesbangpol Kota Mojokerto.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1/E);

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan);
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 35/D);
25. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender;
26. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bakebangpol Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, guna mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bakebangpol Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kota Mojokerto;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kota Mojokerto secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang mempunyai **tugas pokok** merumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional dan mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - 2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

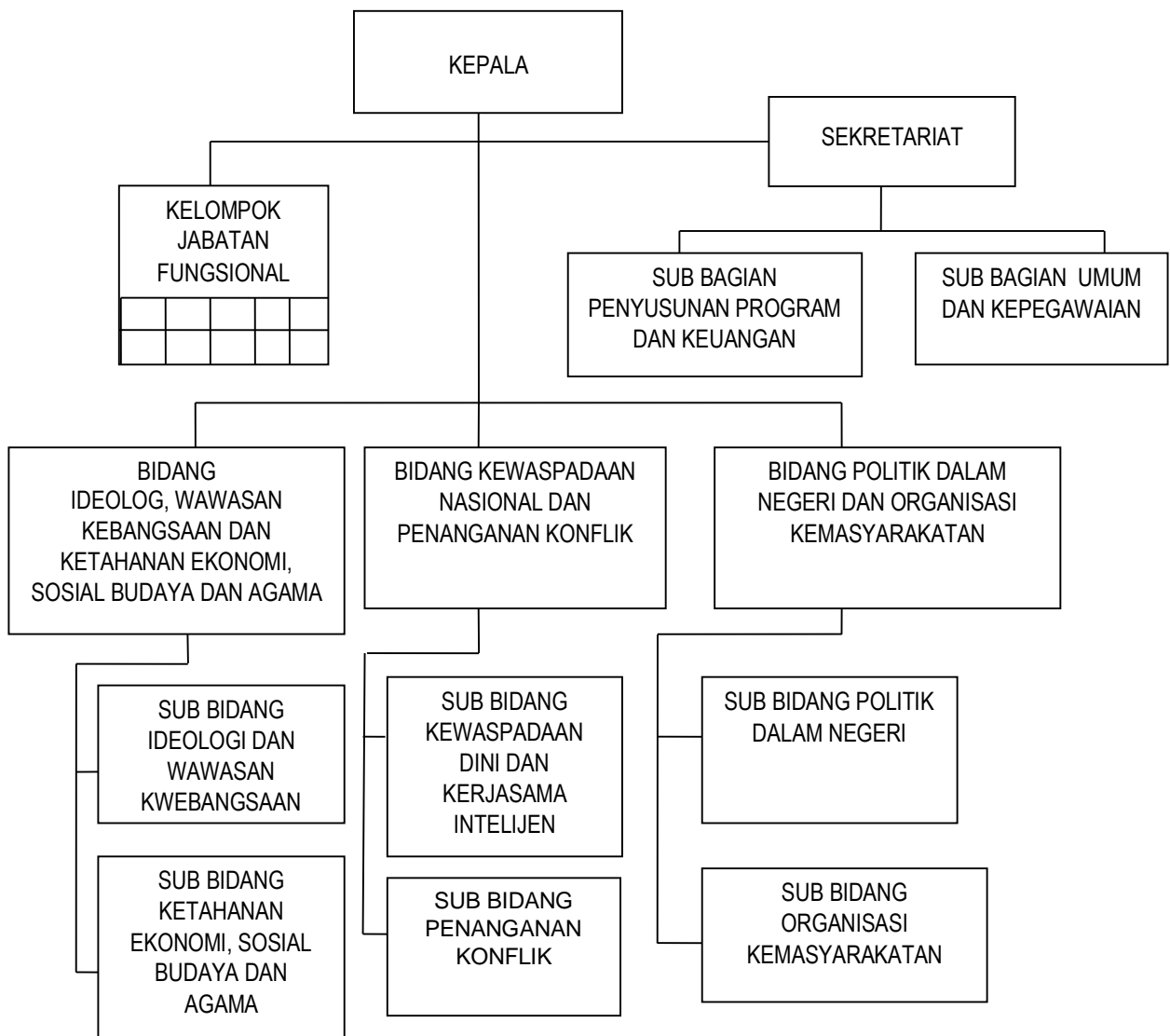
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik
- e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri
  - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**2.2. Sedangkan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :**

Gambar - 2.1

**Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto**

(Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2020)



### 2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah 26 pegawai, yang terdiri dari 11 personil laki-laki dan 9 personil perempuan, 6 honorer laki-laki.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
Bakesbangpol Kota Mojokerto**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	4
2	S1	11
3	D3	0
4	SMA	9
5	SMP	0
6	SD	2
	JUMLAH	26

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Golongan/ Ruang Bakesbangpol  
Kota Mojokerto**

No	Golongan/ Ruang	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	1
3	IV/a	2
4	III/d	6
5	III/c	1
6	III/b	2
7	III/a	2

8	II/c	2
9	II/b	3
	Jumlah	20

**Tabel 2.3**

**Jumlah Pegawai/ Personil Yang Telah Mengikuti Diklatpim  
Bakesbangpol Kota Mojokerto**

No	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM / DIKLATPIM IV	7
2	SPAMA/ DIKLATPIM III	3
3	SPAMEN/ DIKLATPIM II	1
	JUMLAH	11

**Tabel 2.4**

**Jumlah Pegawai/ Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf  
Bakesbangpol Kota Mojokerto**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	7
4	Pejabat Fungsional Umum	-
	Jumlah	11

a. Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol  
Kota Mojokerto**

Urut	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	2006	Baik	1
2	Station Wagon	Toyota / RGK3	2004	Baik	1
3	Station Wagon	TOYOTA /KIJANG INNOVA VW43	2014	Baik	1
4	Pick Up	Toyota / KF60	2005	Baik	1
5	Sepeda Motor	Suzuki / FD125 XSD	2005	Baik	1
6	Sepeda Motor	Yamaha GT 125 Warna Hitam / 2 SV	2014	Baik	1
7	Sepeda Motor	HONDA SPORTY CW / X1BO2N04L O A/T	2015	Baik	1
8	Sepeda Motor	HONDA SPORTY CW / X1BO2NO4 LO A/T	2015	Baik	1
9	Lemari Besi	-	1997	Baik	1
10	Lemari Besi	-	2005	Baik	1
11	Lemari Besi	BROTHER / MFB-4 BS18	2016	Baik	2
12	Rak Besi/Metal	-	1987	Baik	2
13	Filling Besi/Metal	-	1980	Baik	2
14	Filling Besi/Metal	-	1990	Baik	3
15	Filling Besi/Metal	-	2004	Baik	1
16	Filling Besi/Metal	-	2007	Baik	2
17	Brand Kas	-	2007	Baik	1
18	Lemari Sorok	-	2013	Baik	1
19	Lemari Sorok	Tiger / Almari Arsip	2014	Baik	3
20	Lemari Kaca	-	2003	Baik	1
21	Alat Penghancur Kertas	Primatech / Paper Shredders 1200C	2017	Baik	1
22	Papan Pengumuman	-	1997	Baik	1
23	Papan Tulis	-	1980	Baik	2
24	Papan Tulis	-	1999	Baik	1
25	Papan Tulis	-	2000	Baik	1
26	White Board	Sedang	2001	Baik	1
27	White Board	-	2001	Baik	1
28	White Board	-	2001	Baik	1
29	White Board	-	2004	Baik	2
30	White Board	-	2007	Baik	1

31	White Board	-	2007	Baik	1
32	White Board	-	2011	Baik	1
33	White Board	-	2011	Baik	1
34	Lemari Kayu	-	1978	Baik	1
35	Lemari Kayu	-	1980	Baik	1
36	Lemari Kayu	-	1987	Baik	1
37	Lemari Kayu	-	1997	Baik	1
38	Lemari Kayu	-	1998	Baik	1
39	Lemari Kayu	Isabel	1999	Baik	1
40	Lemari Kayu	-	2000	Baik	1
41	Lemari Kayu	-	2017	Baik	3
42	Rak Kayu	-	1997	Baik	3
43	Rak Kayu	-	1999	Baik	1
44	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	-	2011	Baik	1
45	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	Standart TNI	2008	Baik	5
46	Meja Telpon	-	2003	Baik	1
47	Kursi Rapat	-	2008	Baik	12
48	Kursi Rapat	FUTURA	2014	Baik	10
49	Kursi Tamu	kursi tamu	1998	Baik	4
50	Kursi Putar	-	2005	Baik	2
51	Kursi Putar	-	2005	Baik	1
52	Kursi Putar	Isabel	2005	Baik	1
53	Kursi Lipat	Elephant	1999	Baik	2
54	Kursi Lipat	Elephant	1999	Baik	1
55	Kursi Lipat	Elephan	2005	Baik	18
56	Kursi Lipat	brother / br702u	2013	Baik	14
57	Meja Komputer	-	1999	Baik	1
58	Meja Komputer	-	2001	Baik	3
59	Tenda	Tenda Peleton	2005	Baik	2
60	Sofa	Sofa	2014	Baik	4
61	Kursi Kerja	DAICHI Type D-122 HT	2014	Baik	4
62	Kursi Kerja	INDACHI Type D-790	2014	Baik	9
63	Gordyn	GORDEN	2014	Baik	1
64	Jam Elektronik	-	1990	Baik	1
65	Jam Elektronik	-	1999	Baik	1
66	Jam Elektronik	Genderal	1999	Baik	1
67	Jam Elektronik	-	2001	Baik	1
68	Lemari Es	SANYO / SRD225NF	2008	Baik	1
69	AC Unit	Nasional	2003	Baik	1
70	AC Unit	PANASO NIC	2008	Baik	1
71	AC Unit	Panasonic	2010	Baik	3
72	AC Unit	LG / 09ltg	2013	Baik	1
73	AC Split	SAMSUNG / AS18TULN 2 PK	2015	Baik	2
74	Kipas Angin	-	2001	Baik	1
75	Kipas Angin	Maspion	2002	Baik	1
76	Kipas Angin	Icipan	2003	Baik	1
77	Kipas Angin	Maspion	2003	Baik	1
78	Kipas Angin	Panasonic	2005	Baik	2
79	Kipas Angin	Maspion	2005	Baik	1
80	Kipas Angin	Panasonic	2005	Baik	1
81	Televisi	SAMSUNG / 21"	2008	Baik	1
82	Televisi	LG	2011	Baik	1

83	Wireless	-	2006	Baik	1
84	Megaphone	-	2005	Baik	1
85	Step Up/Down	kasugawa / 500 va	1999	Baik	2
86	Camera Film	Sony / HDR -PJ3403E	2015	Baik	1
87	Camera Film	CANON	2015	Baik	1
88	Kaca Hias	-	1997	Baik	2
89	Kaca Hias	-	1999	Baik	2
90	Kaca Hias	-	1999	Baik	1
91	Lambang Instansi	-	2005	Baik	1
92	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2001	Baik	1
93	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2013	Baik	1
94	P.C Unit/ Komputer PC	Philips	1999	Baik	2
95	P.C Unit/ Komputer PC	Daewo	1999	Baik	1
96	P.C Unit/ Komputer PC	-	2003	Baik	1
97	P.C Unit/ Komputer PC	-	2007	Baik	1
98	P.C Unit/ Komputer PC	Genium Intel core 2 Duo,22 GHz / DDRII1GB,HDD	2008	Baik	1
99	P.C Unit/ Komputer PC	GENIUM INTEL CORE 2 DUO,22 GHz / DDDR II 1 GB,HDD	2008	Baik	1
100	P.C Unit/ Komputer PC	INTEL CORE 2 DUO / E7400	2009	Baik	1
101	P.C Unit/ Komputer PC	Intel / Core 2 Duo	2009	Baik	1
102	Lap Top	INTEL CORE 2 DUO / PROC 8400	2009	Baik	1
103	Lap Top	INTER CORE 2 DUO / PROC 8400	2009	Baik	1
104	Lap Top	toshiba / C840	2013	Baik	1
105	Lap Top	LENOVO / E 460-VIA 2OETAO1VIA Core 15 1 TB 8GB DOS 14 Inch	2016	Baik	5
106	Lap Top	ASUS A456UR / Core i5- 7200U	2017	Baik	2
107	Note Book	-	2007	Baik	1
108	Note Book	ASUS A46C / intel Core i5/ 3337U-1.86 GhZ/4Gb DDR3/750Gb HDD	2014	Baik	1
109	Note Book	TOSHIBA	2015	Baik	2
110	Note Book	ASUS / A 442 UQ - FA 019T.	2018	Baik	3
111	Printer	HP DJ 2520	2015	Baik	1
112	Printer	Brother / DCP- J100	2015	Baik	1
113	Printer	HP LASERJET	2015	Baik	1
114	CPU	-	1999	Baik	1
115	Monitor	-	1999	Baik	1
116	Monitor	Samsung	2014	Baik	2
117	Printer	epson / LQ 2180 x	1999	Baik	1
118	Printer	canon / s200px	2005	Baik	1
119	Printer	-	2007	Baik	1
120	Printer	Samsung / ML1640	2010	Baik	4
121	Printer	-	2010	Baik	1
122	Printer	Canon / PIXMA E510	2013	Baik	1
123	Printer	CANO N E 510 Modif	2014	Baik	1
124	Printer	HP Deskjet Ink / Advantage Ultra 4729 All-in one	2016	Baik	3
125	Printer	HP / Deskjet 4675	2017	Baik	5



126	Printer	EPSON / L 4150.	2018	Baik	2
127	Scanner	Brother Desktop / Scanner ADS1600W ASA	2017	Baik	1
128	Server	-	2013	Baik	1
129	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2002	Baik	1
130	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2002	Baik	1
131	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2008	Baik	1
132	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	1999	Baik	1
133	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2003	Baik	1
134	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2005	Baik	1
135	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2005	Baik	1
136	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2007	Baik	1
137	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2007	Baik	1
138	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2007	Baik	4
139	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	WRITING SET	2008	Baik	1
140	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Tiger / Kursi Kerja	2014	Baik	10
141	Lemari Buku untuk Perpustakaan	-	1990	Baik	2
142	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	1989	Baik	1
143	Camera + Attachment	-	2010	Baik	1
144	Camera + Attachment	Canon Digital / Digital EOS 750D with	2017	Baik	1
145	Proyektor + Attachment	Sony / EX4	2009	Baik	1
146	Proyektor + Attachment	BENQ / W1110- 45111600- AGT000057877	2016	Baik	2
147	Audio Amplifier	Sound Queen SQ15A- USB	2014	Baik	1
148	Microphone/Wireless Mic	MIC WIRELESS SH PGX 242	2014	Baik	1
149	Microphone Table stand	MIC MEJA KENWO OD KW 500	2014	Baik	4
150	Layar Proyektor	BRITE / Tripod 96' (TRI- 2424) 45111600- AGT000012247	2016	Baik	2
151	Off Air TV Monitor	Toshiba LED 40L2400VJ	2014	Baik	1
152	Tripod Camera	UFO EXCEL	2015	Baik	1
153	Unit Transcarver/Transmiter UHF	KENWOOD / TM271 A	2008	Baik	1
154	Megaphone	TOAZr2015 / W 15W	2010	Baik	2
155	Pesawat Telephone	-	2002	Baik	1
156	Pesawat Telephone	-	2003	Baik	1
157	Handy Talky	alinco / DJ 196	2005	Baik	3
158	Handy Talky	alinco / DJ 196	2005	Baik	4
159	Handy Talky	KENWOOD / T 255 A	2008	Baik	5
160	Facsimile	Panasonic	2002	Baik	1
161	Facsimile	Panasonic / Telephone Facsimile	2017	Baik	1
162	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	I COM	1999	Baik	1

163	Unit Transceiver UHF Stationary	Bell	2009	Baik	2
164	Compressor	BEHRINGER ULTRA DRIVE PRO DCX 2496	2014	Baik	1
165	Mixer	Mixer 12" Soundcart MFXi8	2014	Baik	1
166	Alat Keamanan Lain-lain	-	1997	Baik	1
167	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2006	Baik	1
168	Peta (Map)	-	1997	Kurang Baik	1
169	Photo	-	1990	Baik	1
170	Photo	-	2001	Baik	1
171	Photo	-	2004	Baik	2
172	Photo	-	2005	Baik	1
173	Gambar	-	1997	Baik	4
174	Karya Seni Asli	-	2000	Baik	2
175	Karya Seni Asli	-	2001	Baik	1
176	Alat Musik/Band	-	1997	Baik	2
177	Alat Musik/Band	-	1997	Baik	2
178	Alat Musik/Band	-	1999	Baik	2
179	Alat Musik/Band	-	2000	Baik	10
180	Alat Musik/Band	-	2001	Baik	2
181	Alat Musik/Band	-	2001	Baik	2
182	Alat Musik/Band	-	2001	Baik	1
183	Alat Musik/Band	-	2002	Baik	1
184	Alat Musik/Band	-	2003	Baik	2
185	Alat Musik/Band	-	2004	Baik	1
186	Alat Musik/Band	-	2004	Baik	1
187	Alat Musik/Band	-	2004	Baik	1
188	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	2
189	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	2
190	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	2
191	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	2
192	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	2
193	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	2
194	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	2
195	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	1
196	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	1
197	Alat Musik/Band	-	2006	Baik	1
198	Alat Musik/Band	-	2009	Baik	11
199	Alat Musik/Band	-	2010	Baik	3
200	Alat Musik/Band	-	2015	Baik	5
201	Alat Musik/Band	-	2015	Baik	1
202	Alat Musik/Band	-	2015	Baik	1
203	Alat Musik/Band	-	2015	Baik	1

## 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dapat dijabarkan dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari

Kondusifitas Wilayah; Politik dan Demokrasi; serta Pembinaan Ormas, LSM dan Partai Politik, dengan penjabaran sebagai berikut :

**a) Kondusifitas Wilayah**

Secara umum situasi di Kota Mojokerto selama kurun waktu 2018-2020 aman dan tertib. Meskipun masih ada beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 s/d 2020.

**Tabel 2.6**  
**Frekuensi Unjuk Rasa di Kota Mojokerto Menurut Kelompok Pelaku**

No	Kelompok Massa	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Mahasiswa	1	2	1
2	Buruh	1	2	1
3	Masyarakat	1	0	1
4	Warga Kota	1	0	-
5	Ormas/kelompok masyarakat	2	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

*Sumber : Badan Kesbangpol kota Mojokerto, 2020*

**Tabel 2.7**  
**Frekuensi Unjuk Rasa di Kota Mojokerto Menurut Tuntutan**

No	Tuntutan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Ideologi	0	0	2
2	Politik	1	1	2
3	Ekonomi	1	1	1
4	Sosbud	1	1	1

5	Hukum dan HAM	1	1	1
6	Pendidikan	1	1	0
7	Kesehatan	1	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Sumber : Badan Kesbangpol kota Mojokerto, 2020

**Tabel 2.8**

**Jumlah Orang Asing Pendatang di Kota Mojokerto**

No	Keterangan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Corp Diplomatik			0
2	Tamu Asing			0
3	Riset Asing			0
4	Shooting Film/artis Asing			0
	<b>Jumlah kali</b>			0
1	Wartawan Asing			0
2	Tenaga kerja asing		18	32
3	Atlet Asing			0
	<b>Jumlah orang</b>			32

Sumber : Bakesbagpol Kota Mojokerto, 2020

**b) Politik dan Demokrasi**

Kondisi politik di Kota Mojokerto dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden, serta pilukada yang berjalan demokratis, tertib, dan damai tanpa disertai pengerahan massa yg berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dlm perhelatan pemilu memiliki kecenderungan menurun.

**Tabel 2.9**  
**TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2014 - 2019**

NO	PEMILIHAN UMUM	TAHUN (PERSENTASE)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	PILPRES	78,26	-	-	-	-	86,79
2	DPR RI	84,43	-	-	-	-	86,46
3	DPD RI	-	-	-	-	-	86,66
4	DPRD PROPINSI	84,43	-	-	-	-	86,43
5	DPRD KOTA MOJOKERTO	84,43	-	-	-	-	85,89

*Sumber : KPU Kota Mojokerto, 2019*

**Tabel 2.10**  
**TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO DALAM**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO**  
**TAHUN 2013 - 2018**

NO	PEMILUKADA	TAHUN (PERSENTASE)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	KOTA MOJOKERTO	81,4	-	-	-	-	79,55

*Sumber : KPU Kota Mojokerto, 2018*

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.11**  
**TAHUN 2018 - 2019**

NO	KEGIATAN	TAHUN (KEGIATAN)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat (Sosialisasi Pemilih Pemula).	-	-	-	5	4

2	Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat (Desiminasi Undang - Undang Pemilu).	-	-	-	1	1
3	Himbauan Peningkatan kesadaran Politik melalui Media Elektronik (Radio).	-	-	-	90	90
4	Himbauan Peningkatan kesadaran Politik melalui Media luar Ruang (baliho).		-	-	2	3
5	Peningkatan Peran Politik Ormas/LSM (Forum Diskusi Politik)	-	-	-	1	1
JUMLAH					99	98

Sumber : Bakesbangpol Kota Mojokerto, 2019

### c.) Pembinaan Ormas/LSM

Dlm rangka pembinaan thd Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masy (LSM) selama kurun waktu 2015-2019 telah dilakukan kegiatan pembinaan ormas/LSM sbgmn tabel dibawah ini

**Tabel 2.12**  
**PEMBINAAN TERHADAP ORMAS, LSM KOTA MOJOKERTO**  
**TAHUN 2015 - 2019**

NO	KEGIATAN	TAHUN (KEGIATAN)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jambore Ormas.	-	-	-	1	1
2	Sarasehan Pendayagunaan Ormas (Diskusi antar Ormas).	-	-	-	1	1
3	Tim Terpadu Pengawasan Ormas	-	-	-	-	4

Sumber : Bakesbangpol Kota Mojokerto, 2019

Adapun penyajian kinerja pelayanan Bakesbangpol disajikan dalam T-C.23 sebagai berikut :

**Table T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat DaerahTahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase konflik Ipoleksosbud yang Diselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
2	Persentase konflik SARA yang diselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
3	Persentase LSM/Ormas/ Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	-	-	-	32,6	67,2	68,5	69,4	70,4	32,7	67,4				100	100			
					9%	9%	5%	9%	4%	0%	0%	-	-	-	3%	3%	-	--	-



**Tabel T-C.24 (Tabel 2.14)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke2023					Rata- rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	673.397.167,20	-	-	-	-	643.822.313,00	-				0,96	-				0,0%	0,0%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	420.800.000,00	-	-	-	-	371.587.251,00	-				0,88	-				0,0%	0,0%
Program Peningkatan disiplin aparatur	19.250.000,00	-	-	-	-	11.475.000,00	-				0,6	-				0,0%	0,0%
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54.144.850,00	-	-	-	-	46.029.150,00	-				0,85	-				0,0%	0,0%

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	779.323.850,00	-	-	-	-	611.474.666,00	-				0,78	-		0,0%	0,0%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	772.581.450,00	232.765.800,00	-	-	-	696.740.850,00	165.570.000,00				0,9	0,71		0,0%	0,0%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	510.752.600,00	-	-	-	-	464.447.250,00	-				0,91	-		0,0%	0,0%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	506.520.250,00	112.196.400,00	-	-	-	452.852.900,00	103.614.400,00				0,89	0,92		0,0%	0,0%
Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	972.104.700,00	1.189.799.325,00	-	-	-	845.202.700,00	1.015.063.575,00				0,87	0,85		0,0%	0,0%
Program Pelayanan Kesekretariatan	-	616.881.475,00	-	-	-	-	588.887.664,00					0,95		0,0%	0,0%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	4.482.840.983,00	4.569.843.555,00	4.661.240.426,10	-	-				-	-		0,0%	0,0%

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	1.128.929.767,00	947.060.322,00	966.001.528,44	-	-				-	-		0,0%	0,0%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-	-	880.967.526,00	937.470.097,00	1.966.855.097,00	-	-				-	-		0,0%	0,0%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	-	-	304.124.292,00	300.818.843,00	306.835.219,86	-	-				-	-		0,0%	0,0%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	622.089.810,00	638.951.302,00	651.730.328,00	-	-				-	-		0,0%	0,0%

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	-	-	2.581.154.801,00	2.147.797.925,00	2.666.453.883,50	-	-				-	-		0,0%	0,0%
---	---	---	------------------	------------------	------------------	---	---	--	--	--	---	---	--	------	------

Sumber: Bakesbangpol Kota Mojokerto (2021)

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto secara keseluruhan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Mojokerto menghadapi beberapa tantangan adalah :

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
3. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
4. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum.
5. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah :

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penatan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, Wacana penyelenggaraan system pemilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD;
2. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bias berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;
3. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah Kota Mojokerto dalam PRJMD Kota Mojokerto khususnya misi ke-5 terkait Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
4. Adanya peluang dukungan dana dari APBD, APBN serta lembaga donor lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi, demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempegaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalahmasalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
  - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
  - b. Adanya potensi arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
  - c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan;
  - d. Berkurangnya ketahanan ekonomi msyarakat yang bisa menimbulkan kerawanan sosial.
  - e. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik



- a. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
  - b. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
  - c. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
  - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
  - e. Adanya kesenjangan ekonomi yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- a. Kurangnya sosialisasi UU Keormasan;
  - b. Kurangnya peran Pengurus Ormas dalam memberdayakan ormasnya masing-masing;
  - c. Kurang maksimalnya peran Pemda didalam memfasilitasi ormas-ormas yang ada;
  - d. Masih berkembangnya interpretasi yang salah di sebagian kalangan masyarakat bahwa politik itu kotor;
  - e. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan demokrasi, terutama para milenial
  - f. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
  - g. Kultur dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung.

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dirumuskan dalam table 3.1 berikut :

Tabel T-B.35 (Tabel 3.1)

**Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Saran Pembangunan Daerah**

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	<p>Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;</p> <p>Adanya potensi arus masuk yang membawa budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;</p> <p>Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan;</p> <p>Menurunnya ketahanan ekonomi msyarakat yang bisa menimbulkankerawanan sosial.</p> <p>Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;</p> <p>Masih adanya potensi konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang kurang tepat;.</p>

			Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
			Masih adanya potensi penyalahgunaan narkoba;
2.	Potensi konflik di masyarakat	Kurang memahami regulasi terkait Keormasan (UU Keormasan)	Kurangnya sosialisasi UU Keormasan sehingga kurang berdayanya Ormas yang telah dibentuk;
		Kurangnya komunikasi dan sinergitas antar Ormas	Terbatasnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempotensikan dan memberdayakan masing-masing Ormas;
		Rendahnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap politik	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran politik sehingga adanya anggapan bahwa politik itu tidak baik, padahal politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi;
		Penerapan Budaya dan Etika dalam berpolitik dan berdemokrasi belum terwujud secara sungguh-sungguh	Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
		Rendahnya minat perempuan untuk terjun di dunia politik	Kultur dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil dan makmur, sejahtera dan bermanfaat”** maka dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
5. **Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;**
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam hal ini terkait dalam tujuan Misi ke 5 (lima) yaitu **“ Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integritas Nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila ”**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.1), maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- 1.Meningkatnya apatisme terhadap pemerintahan
- 2.Rendahnya partipasi masyarakat
- 3.Potensi Konflik Sosial akibat SARA dan dampak tekanan ekonomi
- 4.Menurunnya sikap gotong-royong, tepo sliro dan saling menghargai

Faktor Pendorong:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Prov. Jateng
2. Meningkatnya kualitas apatur pemerintahan
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
4. Meningkatnya peran forum, ormas/LSM

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mojokerto, dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Kesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri merumuskan Misi yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

**Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Tujuan, sebagai berikut:**

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri

Memperhatikan ringkasan Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kota Mojokerto 2018 – 2023 berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan**

#### **Hidup Strategis**

Struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto, tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Kajian Lingkungan Hidup telah dilakukan pada program-program dalam RPJMD termasuk program terkait tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Kota Mojokerto. Program Pemerintah Kota Mojokerto yang diturunkan menjadi Program Perangkat Daerah dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal Perubahan RPJMD.

Kebijakan serta Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kota Mojokerto harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan RTRW tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat di Kota Mojokerto. RTRW menjadi kerangka integratif bagi Bakesbangpol Kota Mojokerto untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan;
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
3. Membantu meningkatkan koordinasi, baik di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program;
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan, sehingga dalam perencanaan program dan kegiatan dapat lebih tepat guna dan tepat sasaran.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, telaah visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2023 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Mojokerto untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. **Kondusivitas Wilayah :**

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;

2. **Toleransi :**

Penguatan kerukunan antar umar beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;

3. **Demokrasi :**

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipati, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Walikota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”***

Misi V Kota Mojokerto yang akan memberikan arah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

***“Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila”***

Misi ini mengupayakan penguatan modal sosial masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. Adapun upaya untuk meningkatkan kesalehan sosial tersebut diwujudkan melalui pendidikan imtaq dan iptek yang seimbang, mengharmoniskan relasi antar kelompok dan organisasi kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya kami sajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 25 (Tabel 4.1)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat	1. Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Persentasi konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentasi konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentasi LSM/Ormas/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	32,69%	67,29%	68,55%	69,49%	70,44%
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP			BB	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat			85,18	86,09	86,17
			Indeks Manajemen Resiko			3	3	3

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan pernyataan sasaran strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan, sebagaimana pada Tabel 5.1 :

**Tabel T-C. 26 ( Tabel 5.1)**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<p>VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokrasi, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.</p>			
<p>MISI V : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Menguatkan ketahanan sosial masyarakat</p>	<p>Menguatnya ketahanan sosial masyarakat</p>	<p>A. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>a. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur</p>
			<p>b. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan</p>
		<p>B. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;</p>	<p>c. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;</p>
			<p>d. Pembentukan Kader Wasbang dan Bela Negara;</p>

<p>C. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran FORKOPIMDA, PUSKOMIN, FKUB, FPK, FKDM, PPWK, Tim Pora dan Timdu PKS;</p>	<p>e. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu).</p>
<p>D. Perlu pengembangan pola pembinaan kepada Ormas secara berkesinambungan dan terukur, dengan prioritas penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM Pengelola Ormas, yang mengedepankan proses dialogis, partisipatif, kesetaraan, dan semangat kebersamaan/keterpaduan antar ormas.</p>	<p>f. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat.</p>
<p>E. Perlu pengembangan pola pembinaan dan pendidikan politik yang lebih humanis, dialogis, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan, yang diprioritaskan pada pembentukan kesadaran menerapkan Budaya dan Etika dalam berpolitik dan berdemokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila, dengan sasaran utama generasi muda, kaum millennial, kaum perempuan, kaum marjinal, dan pemilih pemula, serta mengoptimalkan kerjasama dengan partai politik dan stake holders.</p>	<p>g. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;</p>
	<p>h. Pemetaan Politik, potensi daerah dan potensi kerawanan konflik;</p>
	<p>i. Peningkatan kualitas SDM Pengurus/Pengelola Ormas, penguatan kelembagaan ormas, dan peningkatan kerjasama ormas dengan Pemerintah Kota Mojokerto.</p>

		<p>F. Sebagai bentuk dukungan untuk sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024, perlu pengembangan pola dan metode sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat didalam menggunakan hak politiknya secara baik, benar, dan bertanggungjawab terutama generasi muda kaum mellinial, kaum perempuan, kaum marjinal, dan pemilih pemula,serta mendorong terwujudnya Pemilu dan Pemilukada yang berintegritas, berkualitas, partisipatif, aman, dan damai.</p>	<p>j. Peningkatan dan pengembangan pola pembinaan dan pendidikan politik yang lebih mengedepankan penerapan Budaya dan Etika dalam berpolitik dan berdemokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila.</p> <p>k. Perlu adanya dukungan dana yang memadai dalam rangka sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak Tahun 2024 pada anggaran program/kegiatan Bakesbangpol termasuk anggaran hibah kepada penyelenggaraan pemilukada dan unsur pengamanan (Polresta dan Kodim 0815) yang diarahkan untuk kelancaran tahapan pemilukada, peningkatan kesadaran masyarakat</p>
--	--	--	--

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto untuk kurun waktu Tahun 2018 – 2023 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

#### 6.1 Program dan Kegiatan

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 terdapat 5 (lima) Program, sebagaimana berikut :

##### I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase indikator program yang tercapai, Persentase realisasi anggaran, dan Indeks profesionalitas ASN, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah.
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. Ketetausahaan Dan Kepegawaian Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan dan Jumlah dokumen ketetausahaan dan kepegawaian.

##### II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Jumlah Kelembagaanyang melaksanakan Pemantapan Integrasi Bangsa.

Program ini memiliki kegiatan :

- a. Penguatan Wawasan Kebangsaan Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Jumlah peserta kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan, dan Jumlah rapat dan kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- b. Pemantapan Pembauran Kebangsaan Indikator keluaran atau output

kegiatannya adalah Jumlah peserta kegiatan Pemantapan Pembauran kebangsaan dan jumlah rapat dan kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan.

### **III. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Jumlah Kejadianterkait Konflik Sosial, dan Jumlah laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial. Program ini memiliki kegiatan :

- a. Deteksi Dini Konflik Sosial Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Jumlah rapat dan kegiatan Deteksi Dini Konflik Sosial, Jumlah peserta kegiatan Deteksi Dini Konflik Sosial, dan Jumlah Laporan Pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Jawa Timur.
- b. Cegah Dini Konflik Sosial Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Jumlah rapat dan kegiatan Cegah Dini Konflik Sosial, dan Jumlah peserta kegiatan Cegah Dini Konflik Sosial.

### **IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Memiliki Indikator Kinerja Program atau outcome yaitu Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif, dan Jumlah Partai Politik yangmelakukan kegiatan kaderisasi. Program ini memiliki kegiatan.

- a. Penguatan Budaya Politik Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Jumlah rapat dan kegiatan Penguatan Budaya Politik, Jumlah peserta kegiatan penguatan Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Mojokerto 2018 – 2023.
- b. Pemantapan Etika Politik Indikator keluaran atau output kegiatannya adalah Jumlah rapat dan kegiatan Pemantapan Etika Politik, dan Jumlah Pemilih Pemula yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik.

## **6.2 Kelompok Sasaran**

Yang menjadi kelompok sasaran dari program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 tentunya adalah Pegawai ASN terutama Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan



Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Serta dari elemen masyarakat, seperti pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, praktisi akademis, dll.

### **6.3 Pendanaan Indikatif**

Sedangkan secara lengkap Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebagaimana tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang dapat dilihat pada bagian akhir dokumen.

Tabel T-C.27 (Tabel 6.1)

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kokasi
						Tahun 1 (2019)			
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Menguatkan ketahanan sosial masyarakat	-	-	-	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	-	14 konflik	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
				Jumlah Konflik SARA	-	1 konflik	-		
	Menguatnya ketahanan Sosial masyarakat	-	-	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100%	100%	-		
				Persentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	-		
				Persentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	31%	32,69%	-		
Terwujudnya birokrasi yang bersih				Persentase konflik Ipoleksosbud dan SARA yang diselesaikan		100%			
		1.05.1.01	VI. Program Pelayan administrasi perkantoran	Persentase meningkatnya Pelayanan penatausahaan Perkantoran		100%	643.822.313,00		

		1.05.1.01.02	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu		12 bulan	26.166.579,00		
		1.05.1.01.06	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dirawat secara berkala		6 unit	90.660.800,00		
		1.05.1.01.07	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa		7 orang	56.836.000,00		
		1.05.1.01.08	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan penjaga malam		12 bulan	119.219.984,00		
		1.05.1.01.09	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan		40 unit	21.000.000,00		
		1.05.1.01.10	6. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan		37 macam	20.167.500,00		
		1.05.1.01.11	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		6 macam	26.922.250,00		
		1.05.1.01.12	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		11 macam	3.600.000,00		
		1.05.1.01.15	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2 macam	12.050.000,00		
		1.05.1.01.16	10. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		27 macam	4.931.900,00		

		1.05.1.01.17	11. Penyediaan makanandan minuman	Jumlah mamin rapat rapat		1200 kotak	16.240.000,00		
		1.05.1.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke LuarDaerah	Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah		12 bulan	246.027.300,00		
		<b>1.05.01.02</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur</b>				<b>371.587.251,00</b>		
		1.05.01.02.07	Pengadaan Perengkapgedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan		36 unit	105.150.000,00		
		1.05.01.02.09	Pengadaan peralatangedung kkantor	Jumlah peralatan alatkorsik		1 set	9.500.000,00		
		1.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor	Jumlah gedung kantoryang dipelihara		1 unit	256.937.251,00		
		1.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor /toweryang dipelihara		1 unit	0,00		
		<b>1.05.01.03</b>	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>11.475.000,00</b>		
		1.05.01.03.05	Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus/batik		60 potong	11.475.000,00		
		<b>1.05.01.06</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan sistemlaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>46.029.150,00</b>		

		1.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LKJIP		5 dok	7.491.300,00		
		1.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan		1 dok	2.758.500,00		
		1.05.01.06.09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Renja		4 dok	8.232.400,00		
		1.05.01.06.10	Penyusunan Profil	Jumlah buku profil yang disusun		10 buku	8.604.150,00		
		1.05.01.06.11	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra		1 dok	12.806.500,00		
		1.05.01.06.12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah dokumen SOP		1 dok	6.136.300,00		
		<b>1.05.01.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase penurunan konflik dimasyarakat</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>611.474.666,00</b>		
		1.05.01.15.07	1. Pembinaan kewilayahan	Jumlah Rakor Forkopimda, pemantapan kepemimpinan, rakor penanganan konflik sosial, Forum silaturahmi Foopimda dan study komparasi	<b>15 kali</b>	20 kali	611.474.666,00		
		<b>1.05.01.17</b>	<b>Program Pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mengikuti awasan kebangsaan dan</b>	<b>5%</b>	<b>4,56%</b>	<b>696.740.850,00</b>		

				<b>embinaan ideologi</b>					
		1.05.01.17.01	1. Peningkatan toleransidan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah rakor FKUB, rapat tim instruksi dan pembinaan FKUB		18 kali	267.984.900,00		
		1.05.01.17.02	2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosialdikalangan Masyarakat	Jumlah pengurus Ormas/LSM yang mebgikuti jambore Ormas		100 orang	163.765.450,00		
		1.05.01.17.03	3. Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta BelaNegara dan cerdas cermat		160 orang	124.836.500,00		
		1.05.01.17.05	4. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah pembinaan FPK dan Rakor FPK		13 kali	140.154.000,00		
		<b>1.05.1.18</b>	<b>Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Persentase penurunan konflik di masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>464.447.250,00</b>		
		1.05.1.18.04	1. Fasilitasi dan koordinasi kegiatanupacara	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP	23 kali	23 kali	464.447.250,00		

		<b>1.05.1.21</b>	<b>Program Pendidikan politik masyarakat</b>	<b>Persentase Ormas /LSM/Parpol yang aktif</b>		<b>32,69%</b>	<b>452.852.900,00</b>		
		1.05.1.21.01	1. Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta deseminasi UU Politik, sosialisasi pemahaman demokrasi bagi pelajar		<b>37 kali</b>	173.841.000,00		
		1.05.1.21.03	2. Koordinasi Forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta pendidikan politik		<b>37 kali</b>	45.434.550,00		
		1.05.1.21.05	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monev bantuan keuangan Parpol dan hibah, pemantauan perkembangan politik, desk Pilkada, Tim relawan pemantauan logistik & hitung cepat Pilkada		<b>4 laporan</b>	233.577.350,00		
		<b>1.05.1.23</b>	<b>Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengembangan kewaspadaan Nasional</b>		100%	<b>845.202.700,00</b>		
		1.05.1.23.01	1. Pemantapan kewaspadaan nasional bagi FKDM dan Forkopimda	Jumlah rakor FKDM & Forkopimda Media luar ruang wasbang, Rakor pengurus FKDM tomas dan toga		14 kali	313.944.200,00		
		1.05.1.23.02	2. Peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini terhadap konflik di masyarakat	Jumlah Rakor Dewan Penasehat Sekber & pendidikan dasar intelijen		13 kali	411.933.700,00		

		1.05.1.23.03	3. Pemantapan kegiatan orang asing	Jumlah Kelurahan yang dipantau		18 Kel	73.169.050,00		
		1.05.1.23.05	4. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah sarasehan kebangsaan bagi Purna Paskibraka		1 kali	46.155.750,00		



Tabel T-C.27 (Tabel 6.2)

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kokasi
						Tahun 1 (2019)			
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Menguatkan ketahanan sosial masyarakat	-	-	-	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD Jumlah Konflik SARA	- -	5 konflik 1 konflik	- -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
				Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100%	100%	-		
	Menguatnya ketahanan Sosial masyarakat	-	-	Persentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	-		
				Persentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	32,69%	67,29%	-		
		1.05.01.12	Program Pelayanan Kesekretariatan						
		1.05.01.12.01	Pelayanan administrasi Kantor			12 bulan	494401319		

		1.05.01.12.02	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur			12 bulan	94486345		
		1.05.01.17	.Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi	5%	4,56%	165.570.000,00		
		1.05.01.17.03	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta Bela Negara dan cerdas cermat		0	0,00		
		1.05.01.17.07	2. Fasillitasi dan koordinasi Upacara	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP		23 kali	111.054.000,00		
		1.05.01.17.08	6. Pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan		217 orang	54.516.000,00		
		1.05.01.17.09	7. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah peserta aktualisasi ideologi Pancasila		0,00	0,00		
		1.05.1.21	Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase Ormas /LSM/Parpol yang aktif		67,29%	103.614.400,00		
		1.05.1.21.01	1. Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta deseminasi UU Politik, sosialisasi pemahaman demokrasi bagi pelajar		1650 orang	7.039.000,00		
		1.05.1.21.03	2. Koordinasi Forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta pendidikan politik		360 orang	15.262.300,00		

		1.05.1.21.05	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monev bantuan keuangan Parpol dan hibah, pemantauan perkembangan politik, desk Pilkada, Tim relawan pemantauan logistik & hitung cepat Pilkada		12 dok	22.305.000,00		
		1.05.1.21.06	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah peserta sarasehan, gelar kreatifitas ormas, jambore Ormas, FGD Ormas, Rakor Tim verifikasi Ormas		370 orang	59.008.100,00		
		1.05.1.23	Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Persentase pembinaan dan pengembangan kewaspadaan Nasional		100%	1.015.063.575,00		
		1.05.1.23.07	5. Pemantapan kewaspadaan Nasional	Jumlah pembinaan FKDM dan fasilitasi ketahanan bangsa		14 kali	330.432.000,00		
		1.05.1.23.08	Pembinaan kewilayahan	Jumlah pembinaan wilayah		18 kel	476.080.300,00		
		1.05.1.23.09	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah konflik SARA yang ditangani		1 konflik	118.349.200,00		
		1.05.1.23.10	Pemantapan Forum Pembauran kebangsaan	Jumlah pembinaan FPK		13 kali	90.202.075,00		

Tabel T-C.27 (Tabel 6.3)

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kokasi
						Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah			
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Menguatkan ketahanan sosial masyarakat				Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD		4 konflik		3 konflik		3 konflik		3 konflik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
				Jumlah Konflik SARA		1 konflik		1 konflik		1 konflik		1 konflik			
	Menguatkan ketahanan sosial masyarakat			Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%			
				Persentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%			

				Persentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	31%	68.55%		69.49%		70.44%		70,44%		
		8. 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
		8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			10,000,107,179.00		8.344.108.998,72		8.384.381.106,48		26.728.597.285,00		
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		4,482,840,983.00	100%	4.021.462.328,40	100%	4.021.462.328,40	100%	12.525.765.640,00		
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasidan Pelaporan Program yang disusun		36,402,454.00	17 dokumen	32.674.840,00	8 dokumen	13.627.076,87	8 dokumen	101.773.274,18		
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan		28,978,454.00	16 dokumen							

		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan				8 dokumen	32.674.840,00	8 dokumen	13.627.076,87	8 dokumen	101.773.274,18		
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku profil yang disusun		10 buku	7,424,000.00								
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100%	3,131,481,237.00	100%	2.810.817.548,00	100%	2.810.817.548,00	100%	8.754.935.142,47		
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN dibayarkan tepat waktu		12 bulan	2,961,053,328.00	12 bulan	2.657.841.463,20	12 bulan	2.657.841.463,20	12 bulan	8.278.456.083,30		
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya Dibayarkan tepat waktu		12 bulan	167,520,000.00	12 bulan	150.365.952,00	12 bulan	150.365.952,00	12 bulan	468.349.202,65		
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan		1 dokumen	2,907,909.00	1 dokumen	2.610.132,80	1 dokumen	2.610.132,80	1 dokumen	8.129.856,52		

8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu		120 potong	51,274,000.00	120 potong	33.743.582,40	120 potong	14.072.797,03	120 potong	105.102.117,21		
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu		120 potong	51,274,000.00	75 potong	33.743.582,40	120 potong	14.072.797,03	120 potong	105.102.117,21		
.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	538,112,043.00	100%	471.455.656,32	100%	196.621.084,25	100%	1.468.456.640,51		
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	8,692,908.00	12 bulan	7.802.748,80	12 bulan	3.254.144,71	12 bulan	24.303.448,56		
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		12 bulan	25,316,281.00	12 bulan	22.723.893,28	12 bulan	9.477.023,93	12 bulan	70.778.771,11		
		Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya		12 bulan	70,000,000.00	12 bulan	51.278.304,00	12 bulan	21.385.671,37	12 bulan	159.718.024,41		
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan		12 bulan	43,417,999.00	12 bulan	38.971.988,00	12 bulan	16.253.309,16	12 bulan	121.387.184,15		
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah barang cetakan dan		12 bulan	30,509,310.00	12 bulan	27.385.156,48	12 bulan	11.421.008,71	12 bulan	85.297.343,12		

	dan Penggandaan	penggandaan yang disediakan											
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibaca/dimafnfaatkan		12 bulan	16,281,454.00	12 bulan	14.614.230,40	12 bulan	6.094.880,37	12 bulan	45.519.368,34		
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan		12 bulan	36,000,000.00	12 bulan	32.313.600,00	12 bulan	13.476.421,34	12 bulan	100.648.109,45		
		Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 bulan	307,894,091.00	12 bulan	276.365.735,36	12 bulan	115.258.624,66	12 bulan	860.804.391,38		
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan sesuai rencana		100%	70,640,700.00	100%	63.407.080,00	100%	63.407.080,00	100%	197.495.875,66		
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		10 unit	33,638,428.60								



	Bangunan Lainnya												
		Jumlah perlengkapan gedung kantor		11 unit	37,002,271.40								
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia				21 unit	63.407.080,00	21 unit	63.407.080,00	21 unit	197.495.875,66		
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening telepon, internet, PDAM, petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang dibayarkan tepat waktu		12 bulan	236,780,400.00	12 bulan	212.534.124,00	12 bulan	212.534.124,00	12 bulan	661.986.215,54		
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu		12 bulan	78,380,400.00	12 bulan	70.354.284,00	12 bulan	70.354.284,00	12 bulan	219.134.533,96		
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		12 bulan	158,400,000.00	12 bulan	142.179.840,00	12 bulan	142.179.840,00	12 bulan	442.851.681,59		

8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai rencana		95%	418,150,149.00	95%	396.829.497,68	95%	396.829.497,68	95%	1.236.016.374,41		
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala		12 bulan	153,131,999.00	12 bulan	137.451.292,00	12 bulan	137.451.292,00	12 bulan	428.123.535,65		
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki		12 bulan	31,000,000.00	12 bulan	27.825.600,00	12 bulan	27.825.600,00	12 bulan	86.669.205,36		
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara		1 unit	234,018,150.00	1 unit	231.552.605,68	1 unit	231.552.605,68	1 unit	721.223.633,40		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASIL	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan		4.90%	1,128,929,767.00	5.04%	833.413.083,36	5.18%	833.413.083,36	5.18%	2.795.755.934,00		

	A DAN KARAKTER KEBANGSAAN	wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi											
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan		49 kali	1,128,929,767.00	49 kali	833.413.083,36	48 kali	833.413.083,36	48 kali	2.795.755.934,00		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan		2 perusahaan / tahun	23,285,600.00								
		Jumlah peserta bela negara & cerdas		100 orang	69,212,614.00								

		cermat											
		Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan		100 orang	389,312,409.00								
		Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP		23 kali	647,119,144.00								
		Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah Kebangsaan				15 kali	191.691.642,56	15 kali	191.691.642,56	15 kali	643.046.117,09		
		Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP				24 kali	472.816.792,80	24 kali	472.816.792,80	24 kali	1.586.104.634,73		

		Jumlah pelaksanaan koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)				10 kali	168.904.648,00	10 kali	168.904.648,00	10 kali	566.605.182,18		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase LSM/Ormas/ Parpol yang aktif		68.55%	880,967,526.00	69.49%	772.173.685,36	70.44%	772.173.685,36	70.44%	2.425.314.897,00		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanipulan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Parpol yang dibina.		35 kali	880,967,526.00	9 Parpol & 20 kali	772.173.685,36	9 Parpol & 20 kali	772.173.685,36	9 Parpol & 20 kali	2.425.314.897,00		

	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah												
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol		4 laporan	126,132,726.00	8 laporan	72.207.619,57	8 laporan	35.879.324,69	8 laporan	112.693.118,54		
		Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina (bantuan keuangan 9 Parpol),		9 Parpol	643,303,027.00	9 Parpol dan 3 kegiatan	566.212.118,65	9 Parpol dan 3 kegiatan	590.916.716,88	9 Parpol dan 3 kegiatan	1.856.006.159,63		

		verifikasi bantuan keuangan Parpol, Bintek keuangan Parpol serta hibah Pemilukada serentak 2024											
		Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat, generasi muda, pemilih pemula, tokoh masyarakat & disabilitas		600 orang	111,531,773.00	8 kali	133.753.947,14	9 kali	145.377.643,79	9 kali	456.615.618,83		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/Ormas yang aktif		68.55%	304,124,292.00	69.49%	264.720.581,84	70.44%	284.769.822,06	70.44%	853.614.696,00		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah LSM/Ormas yang dibangun dan dimonitoring		4 kali	304,124,292.00	26 kali	264.720.581,84	26 kali	284.769.822,06	26 kali	853.614.696,00		

8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi Ormas				14 kali	65.476.576,00	14 kali	70.435.599,56	14 kali	211.134.952,67		
		Jumlah peserta LSM/Ormas yang dibina dalam jambore				2 kali	124.891.588,80	2 kali	134.350.549,07	2 kali	402.723.864,03		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi Ormas		100 orang	72,946,274.00								
		Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore		100 orang	139,139,473.00								



		Jumlah Parpol/LSM/Ormas yang dibina		200 Ormas	92,038,545.00								
		Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring				10 kali	74.352.417,04	10 kali	79.983.673,44	10 kali	239.755.879,30		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase konflik SARA yang ditangani		100%	622,089,810.00	100%	562.277.145,76	100%	582.500.013,30	100%	1.766.866.969,00		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan pekerjaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		20 kali	622,089,810.00	23 kali	562.277.145,76	23 kali	582.500.013,30	23 kali	1.766.866.969,00		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	Jumlah Rakor FKUB		8 kali	468,452,778.00								

	Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
		Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan		10 kali	27,431,668.00								
		Jumlah konflik SARA yang ditangani		1 kali	56,360,637.00								
		Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar Keagamaan		4 kali	69,844,727.00								
		Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan				14 kali	253.190.016,64	14 kali	262.296.252,25	14 kali	795.609.568,44		
		Hibah FKUB				1 kali	248.461.273,28	1 kali	257.397.434,84	1 kali	780.750.240,60		
		Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi				8 kali	60.625.855,84	8 kali	62.806.326,20	8 kali	190.507.159,96		

		pengecahan penyalagunaan narkotika											
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani		100%	2,581,154,801.00	100%	1.890.062.174,00	100%	1.890.062.174,00	100%	6.361.279.149,00		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		60 kali	2,581,154,801.00	79 kali	1.890.062.174,00	81 kali	1.890.062.174,00	81 kali	6.361.279.149,00		
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah pembinaan FKDM dan ketahanan bangsa		27 kali	691,753,727.00								

	Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah												
		Jumlah pembinaan wilayah		18 kelurahan	406,219,477.00								
		Jumlah peserta deseminasi P4GN		100 orang	63,647,434.00								
		Jumlah Rakor Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		6 kali	172,032,619.00								
		Jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora				29 kali	1.129.429.818,00	29 kali	927.937.578,53	29 kali	3.123.108.885,57		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Jumlah Rakor Forpimdayang diselenggarakan		8 kali	1,247,501,544.00								

		8.01.06.2.01.04	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
				Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Konflik Sosial				14 kali	351.432.356,00	14 kali	288.736.213,84	14 kali	971.783.723,26	
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	Jumlah silaturahmi Forpimda, study komparasi, sinergitas OPD dan Forkopimda				36 kali	409.200.000,00	38 kali	673.388.381,63	38 kali	2.266.386.540,17	

**Tabel T-C. 27 (Tabel 6.4)**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol**  
**Kota Mojokerto Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kokasi
						Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah			
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Menguatkan ketahanan sosial masyarakat				Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD		4 konflik		3 konflik		3 konflik		3 konflik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
				Jumlah Konflik SARA		1 konflik		1 konflik		1 konflik		1 konflik			
Menguatnya ketahanan sosial masyarakat				Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%			
				Persentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

				Persentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	31%	68.55%	69.49%	70.44%	70,44%				
		8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintah	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.384.381.106,48		26.728.597.285,00	
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					BB Level 2 86,17	4.021.462.328,40	100%	12.525.765.640,00	
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan					100%	13.627.076,87	8 dokumen	101.773.274,18	
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan					16 dokumen	13.627.076,87	8 dokumen	101.773.274,18	
		8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun tepat waktu dan sesuai					10 dokumen				

		aturan											
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan						<b>100%</b>	<b>2.810.817.548,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.754.935.142,47</b>		
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan						12 transaksi	2.657.841.463,20	12 bulan	8.278.456.083,30		
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Transaksi Honor Pengelolaan Keuangan yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan						12 transaksi	150.365.952,00	12 bulan	468.349.202,65		
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan						1 dokumen	2.610.132,80	1 dokumen	8.129.856,52		
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>						<b>100%</b>	<b>14.072.797,03</b>	<b>120 potong</b>	<b>105.102.117,21</b>		



8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan						120 potong	14.072.797,03	120 potong	105.102.117,21		
<b>.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>						<b>100%</b>	<b>196.621.084,25</b>	<b>100%</b>	<b>1.468.456.640,51</b>		
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						1 paket	3.254.144,71	12 bulan	24.303.448,56		
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket ATK yang disediakan						12 paket	30.862.695,30	12 paket	230.496.795,52		
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan						9 paket	16.253.309,16	12 bulan	121.387.184,15		
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan						12 paket	11.421.008,71	12 bulan	85.297.343,12		
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang disediakan						12 paket	6.094.880,37	12 bulan	45.519.368,34		
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi KPD	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan						48 kali	13.476.421,34	12 bulan	100.648.109,45		

		Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah						48 laporan	115.258.624,66	12 bulan	860.804.391,38		
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ</b>						<b>100%</b>	<b>63.407.080,00</b>	<b>100%</b>	<b>197.495.875,66</b>		
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tepat waktu dan sesuai aturan						21 unit	63.407.080,00	21 unit	197.495.875,66		
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan</b>						<b>100%</b>	<b>212.534.124,00</b>	<b>12 bulan</b>	<b>661.986.215,54</b>		
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet yang tepat waktu dan tepat jumlah						12 Transaksi	70.354.284,00	12 bulan	219.134.533,96		
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tepat waktu dan tepat jumlah						12 Transaksi	142.179.840,00	12 bulan	442.851.681,59		

8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						95%	396.829.497,68	95%	1.236.016.374,41		
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan tepat waktu						7 transaksi	137.451.292,00	12 bulan	428.123.535,65		
		Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan						4000 liter					
		Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik						3 unit					
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor dalam kondisi baik						55 Unit	27.825.600,00	12 bulan	86.669.205,36		
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor						1 Paket	231.552.605,68	1 unit	721.223.633,40		
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kasus Ideologi						0 (zero)	833.413.083,36	5.18%	2.795.755.934,00		

8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						2 Dokumen	833.413.083,36	48 kali	2.795.755.934,00		
		2. Persentase Peserta yang faham materi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						20 %					
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan sesuai perencanaan						12 kegiatan	191.691.642,56	15 kali	643.046.117,09		
		Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP						16 kegiatan	472.816.792,80	24 kali	1.586.104.634,73		
		Jumlah Rakor Dewan Penasehat dan Pengurus FPK, Sosialisasi Pembauran Kebangsaan sesuai jadwal						7 kegiatan	168.904.648,00	10 kali	566.605.182,18		

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik						70.44%	772.173.685,36	70.44%	2.425.314.897,00		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politikdi daerah	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik						70.44%	772.173.685,36	9 Parpol & 20 kali	2.425.314.897,00		
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat						13 kegiatan (9 Parpol & 4 Lembaga	35.879.324,69	8 laporan	112.693.118,54		

	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah							Pendidikan )					
		Jumlah kegiatan pembinaan Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD, verifikasi bantuan keuangan Parpol						10 kegiatan (1 bimtek & 9 dokumen BA hasil verifikasi untuk 9 Parpol)	590.916.716,88	9 Parpol dan 3 kegiatan	1.856.006.159,63		
		Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik						6 laporan	145.377.643,79	9 kali	456.615.618,83		
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase LSM / Organisasi Masyarakat terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan</b>						70.44%	284.769.822,06	70.44%	853.614.696,00		
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>Persentase LSM / Organisasi Masyarakat terdaftar, yang dibina dan dilakukan pengawasan</b>						70.44%	<b>284.769.822,06</b>	<b>26 kali</b>	<b>853.614.696,00</b>		

8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusiOrmas					14 kali	70.435.599,56	14 kali	211.134.952,67		
		Jumlah peserta LSM/Ormas yang dibinadalam jambore					2 kali	134.350.549,07	2 kali	402.723.864,03		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore					100 orang	79.983.673,44	10 kali	239.755.879,30		
		Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti Forum Diskusi Antar Ormas					100 orang					
		Jumlah LSM/Ormas yang dilakukan pengawasan					18 Ormas					
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>					0,05%	582.500.013,30	100%	1.766.866.969,00		

8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						2 Dokumen	582.500.013,30	23 kali	1.766.866.969,00		
		2. Persentase peserta sosialisasi yang memahami materi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						70 %					
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rakor dan Sosialisasi P4GN yang dilaksanakan sesuai perencanaan						5 kali	262.296.252,25	14 kali	795.609.568,44		
		Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	Jumlah Desiminasi, Rakor dan Sosialisasi P4GN lama	Jumlah Rakor dan Sosialisasi P4GN yang dilaksanakan sesuai perencanaan	5 kali			14 kali	262.296.252,25	14 kali	795.609.568,44		



			Jumlah Rakor FKUB, Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM), dan Hibah	15 kali											
			Jumlah Rakor FKUB, Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM), dan Verifikasi dan Evaluasi Hibah yang dilaksanakan sesuai perencanaan	5 kali											
			Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan sesuai perencanaan												

		Hibah FKUB		Jumlah Rakor FKUB, Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM), dan Verifikasi dan Evaluasi Hibah yang dilaksanakan sesuai perencanaan				1 kali	257.397.434,84	1 kali	780.750.240,60		
		Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika	Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan sesuai perencanaan					8 kali	62.806.326,20	8 kali	190.507.159,96		
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan</b>						100%	1.890.062.174,00	100%	<b>6.361.279.149,00</b>		
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangana</b>	<b>Persentase penanganan kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditangani sesuai SOP</b>						90%	<b>1.890.062.174,00</b>	<b>81 kali</b>	<b>6.361.279.149,00</b>		

	<b>n Konflik Sosial</b>												
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen laporan kewaspadaan dini akurat, cepat dan tepat						10 Dokumen	927.937.578,53	29 kali	3.123.108.885,57		
		Jumlah dokumen laporan kejadian situasi dan kondisi keamanan dan ketentraman yang akurat, cepat dan tepat						12 dokumen					
		Persentase peserta yang faham tentang pengetahuan intelijen						100%					
		Jumlah laporan rapat koordinasi tim PKS						10 Kaporan					
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah laporan rapat koordinasi					48 Laporan	288.736.213,84	14 kali	971.783.723,26			

			Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah											
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan DaerahKab/Kota	Jumlah Laporan Forum Koordinasi						38 kali	673.388.381,63	38 kali	2.266.386.540,17	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Bakesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Bakesbangpol Kota Mojokerto yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel T-C. 28**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		32,69%	67,29%	68,55%	69,49%	70,44%	70,44%	70,44%
4	Persentase realisasi anggaran Persentase capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,0	79,06	85,12	85,18	86,09	86,17	86,17	86,17
7	Indeks Manajemen Resiko				1	2	3	3	3

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

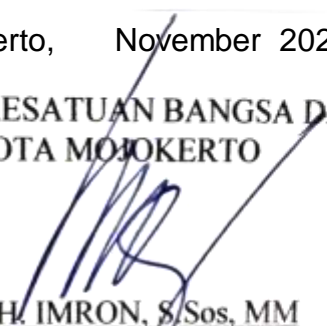
Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2018-2023, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Mojokerto, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bakesbangpol beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bakesbangpol secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesatuan bangsa dan politik dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bakesbangpol Kota Mojokerto.

Mojokerto,      November 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MOJOKERTO**

  
**MOCH. IMRON, S/Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720828 199201 1 001